

## BAB III

### KONFLIK DI SURIAH TAHUN 2011-2015

Bab III akan menjelaskan tentang sejarah negara Suriah, sistem pemerintahan Suriah, kapan konflik Suriah dimulai, faktor-faktor konflik, siapa saja aktor-aktor yang terlibat, bagaimana awal mula terjadinya konflik hingga bagaimana kronologi konflik berlangsung dan apa dampak yang diperoleh Suriah dari konflik yang terjadi.

#### A. Sejarah Negara Suriah



Gambar 3.1

Peta Negara Suriah

Pada awalnya Suriah merupakan bagian wilayah Republik Arab. Suriah terletak di kawasan Asia Barat dengan Ibu Kota Damaskus. Suriah berbatasan sebelah utara dengan Turki, sebelah timur dengan Irak, sebelah selatan dengan Yordania, sebelah barat daya dengan Israel, sebelah barat dengan Lebanon dan Laut Tengah. Suriah memiliki iklim yang ekstrim dimana musim hujan berlangsung dari September sampai dengan Mei. Iklim cenderung kering dikarenakan berbatasan dengan laut Mediterania. Keadaan pantai saat musim dingin berada pada suhu siang antara 15-20 derajat. Suhu di pedalaman lebih dingin sedangkan di pegunungan dan gurun mengalami turun salju. Saat musim panas suhu di pedalaman bisa mencapai 40°C, sementara daerah pantai dan pegunungan lebih dingin namun kekeringan terjadi dimana-mana. Selain itu, wilayah Suriah didominasi oleh daratan padang pasir sehingga sumber air sulit didapatkan. Permasalahan air inilah yang terkadang menimbulkan konflik antara Suriah dan negara-negara sekitarnya karena mereka harus berbagi memaksimalkan Sungai Efrat dan anak-anak sungainya sebagai sumber utama air bagi negara mereka. Bahasa resmi Suriah adalah bahasa Arab, namun di beberapa wilayah menggunakan bahasa keseharian yang berbeda. Contohnya, di Kurdi masyarakatnya menggunakan bahasa Kurdi. Kemudian, penggunaan bahasa Inggris, bahasa Turki dan bahasa Perancis sebagai bahasa kedua.

Penduduk Suriah didominasi oleh Muslim Sunni yang memiliki pengaruh yang cukup besar di Suriah dalam pembentukan nilai-nilai negara. Jumlah Muslim Sunni sebanyak 75%, Kristen 19% dan beberapa sekte Islam yaitu Alawiy 11.5%, Druze 3% dan Ismailiy 1,5% yang mereka rata-rata tinggal di pedesaan. Suriah tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi melebihi

pertumbuhan penduduk di Uni Eropa. Pada tahun 2009 saja tercatat penduduk Suriah sebesar 20 juta orang. (Philips, 2010). Dari keseluruhan penduduk itu, sebanyak 54% mereka tinggal di perkotaan dan sisanya tinggal di pedesaan. Masyarakat Suriah memiliki presentase yang cukup tinggi pada masyarakatnya yang tinggal di pedesaan karena Suriah masih mengandalkan sektor pertanian. Perekonomian Suriah mengunggulkan sektor pertanian dan industry dimana sebagian hasil pertanian di eskpor ke beberapa negara tetangga. Selain pertanian dan industri, Suriah juga mengembangkan sektor peternakan terutama kambing dan domba. Sementara proyek-proyek industri seperti gula, tekstil, pupuk dan bahan pangan terfokus di beberapa kota besar di Suriah seperti Damaskus dan Homs. Sektor pariwisata Suriah mengandalkan objek-objek wisata bersejarah dan reruntuhan bangunan-bangunan kuno namun, sektor ekonomi Suriah masih tidak seimbang dan tetap bergantung pada bantuan dari luar negeri. Suriah merupakan negara yang strategis dikarenakan terletak di antara Benua Eropa, Asia dan Afrika. Di masa lalu, Suriah dijadikan wilayah pengontrol bagi para bangsa-bangsa penjajah terhadap kekuasaannya yang berada di Eropa, Asia dan Afrika. Karena letaknya yang strategis ini, Suriah menjadi kawasan perdagangan khususnya pada minyak dan menjadi wilayah pengangkut minyak Timur Tengah ke Eropa dan benua-benua lainnya. Selain itu, Suriah dikenal sebagai salah satu peradaban tertua dan sejarah kekristenan dunia. Agama Kristen pertama kali diorganisir di Antiokhia pada Suriah Kuno dan banyak jejak-jejak misionaris hingga munculnya tokoh penting gereja Kristen yaitu Rasul Paulus.

Kerajaan Suriah pertama kali didirikan oleh Faisal I dari keluarga Hashimiah pada tahun 1920, namun kemudian Ia menjadi Raja Irak.

Pemerintahannya di Suriah terbilang singkat karena hanya bertahan beberapa bulan saja setelah terjadi bentrokan antara pasukan Arab Suriah dan pasukan Perancis dalam Pertempuran Maysalun. Pasukan Perancis menduduki Suriah setelah terselenggaranya Konferensi San Remo dan meminta Liga Bangsa-Bangsa untuk menjadikan Suriah sebagai wilayah di bawah kekuasaan Perancis (Peter N. Stearns). Sultan Pasha Al-Trash kemudian melakukan pemberontakan di Druze pada 23 Agustus 1925, pertempuran ini meliputi seluruh wilayah Suriah dan Lebanon sehingga menjadi salah satu revolusi penting atas berlakunya mandat Perancis yang ingin menjadikan Suriah sebagai salah satu wilayah kekuasaannya. Pertempuran antara pasukan Perancis dan para pemberontak tak terelakan dan meletuslah pertempuran di kota-kota besar di Suriah seperti di Damaskus, Homs dan Hama. Pasukan Sultan Pasha Al-Trash berhasil memenangkan pertempuran namun Perancis mengirimkan pasukan tambahan dengan membawa senjata modern ke Suriah, Lebanon, Maroko dan Senegal. Kemenangan berada ditangan Perancis sekaligus berhasil memenangkan beberapa kota besar di Suriah dan Lebanon. Perancis berhasil menangkap Sultan Pasha Al-Trash dan siap akan dihukum mati. Namun, ternyata Sultan Pasha Al-Trash berhasil kabur kembali ke Suriah setelah ditandatanganinya Perjanjian antara Perancis dan Suriah yang berisi tentang pemberian kemerdekaan Suriah pada September 1936. Hasim Al-Atassi selaku perdana menteri dibawah pemerintahan Raja Faisal dipilih sebagai presiden pertama pada Republik Modern Suriah dengan konstitusi baru.

Setelah berhasil bebas dari Perancis, Suriah berencana melakukan diskusi persatuan dengan Mesir. Pihak Mesir menyetujui rencana persatuan tersebut dan diumumkan pada Februari 1958. Namun sayangnya persatuan ini tidak bertahan

lama karena Suriah ingin memisahkan diri dan kembali menjadi Republik Suriah. Kabinet baru dibentuk dan Partai Ba'ath menjadi partai yang menguasai pemerintahan. Pada Nopember 1970, terjadi kudeta militer yang melibatkan Menteri Pertahanan Suriah kala itu yaitu Hafez Al-Assad. Hafez menobatkan dirinya sebagai Perdana Menteri Suriah dan memimpin Suriah hingga Juni 2000. Setelah Hafez wafat, kepemimpinannya digantikan oleh anaknya yang bernama Bashar Al-Assad.

## **B. Sistem Pemerintahan Suriah**

Bentuk Pemerintahan Suriah adalah republik dimana kepala negara dipimpin oleh presiden dengan masa jabatan 7 tahun. Anggota partai dari presiden mayoritas akan menguasai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu, kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Namun, pemerintahan Suriah jauh dari sistem demokratis. Hal ini terbukti dengan keberadaan partai-partai politik di Suriah namun hanya satu partai yang selalu menang yaitu Partai Ba'ath. Partai Ba'ath mengontrol politik, sosial dan ekonomi dengan mengandalkan kekuatan militer. Salah satu presiden yang berjaya dengan sikap otoriternya dengan dukungan Partai Ba'ath adalah Hafez Al Assad yang memerintah sejak tahun 1971 hingga 2000 dan menjadi tokoh yang paling berpengaruh di Timur Tengah. Hafez Al-Assad lahir pada 6 Oktober 1930 dan berasal dari Keluarga Alawite yang merupakan cabang Islam Syiah (Subekti, 2014). Hafez merupakan Menteri Pertahanan Suriah kala itu sekaligus tergabung dalam Angkatan Udara Suriah. Hafez melakukan Kudeta Militer pada Nopember 1970 dan menobatkan dirinya sebagai Perdana Menteri Suriah. Suriah berada dibawah kepemimpinan Hafez sampai Juni 2000 ketika Hafez tutup usia dan digantikan oleh anaknya bernama

Bashar Al-Assad. Pada mulanya, Hafez Al-Assad berencana meneruskan kekuasaannya setelah ia wafat kepada adiknya yang bernama Rif'at Al-Assad, kepala pusat pertahanan Suriah. Namun ternyata Rif'at secara terang-terangan memiliki rencana menggulingkan posisi Hafez sehingga Hafez memecatnya dari posisi kepala pusat pertahanan. Kemudian Hafez menunjuk putra tertuanya yaitu Basil As-Assad sebagai penerus kekuasaannya. Hafez mempersiapkan baik-baik Basil agar layak menjadi presiden Suriah, namun sayangnya Basil mengalami kecelakaan pada 1994 dan meninggal dunia. Akhirnya kekuasaan diteruskan kepada adik Basil Al-Assad yaitu Bashar Al-Assad yang kala itu tengah menempuh pendidikan di London dan langsung dipanggil pulang oleh Hafez. Setelah Bashar kembali ke Suriah, Bashar dilatih oleh ayahnya secara bertahap agar bisa menjadi presiden. Langkah pertama, Hafez membangun kekuatan dukungan militer dan perlindungan agar berada dipihaknya. Kedua, Hafez membuat image Bashar Al-Assad yang baru dan memperkuatnya dihadapan publik. Ketiga, Bashar Al-Assad diperkenalkan mendalam tentang sistem dan mekanisme mengatur negara (Hermawan & M. Nur Rokhman, 2016).

Setelah Hafez wafat dan digantikan oleh Bashar, tidak ada konflik dan pertentangan yang terjadi. Hal ini ternyata sudah dipersiapkan oleh Hafez mulai dari mengganti komponen tertinggi negara dengan orang-orang dipihaknya serta menyingkirkan pihak-pihak yang sekiranya berpotensi menjadi penentangannya. Kemudian Hafez juga mengganti konstitusi agar memungkinkan Bashar bisa menjadi presiden. Karena umur Bashar saat itu masih sangat muda, maka konstitusi diubah untuk persyaratan usia presiden dari 40 tahun menjadi 34 tahun (Philips, 2010). Demi menunjang karirnya sebagai presiden, Bashar mendapatkan

kenaikan pangkat menjadi Letnan Jendral dan ditetapkan menjadi penglima tertinggi angkatan bersenjata Suriah. Kemudahan yang didapatkan oleh Bashar ini tak lepas dari peran para petinggi negara yang sudah disusun kembali oleh Hafez sebelum Ia wafat dimana para petinggi itu terdiri dari orang-orang yang rezim Al-Assad. Resmi dilantik pada Juli 2000, masa awal pemerintahan Bashar sebagai presiden Ia menyatakan akan memimpin dengan gaya yang berbeda dari masa pemerintahan ayahnya. Bashar akan menjadikan Suriah lebih modern dan demokratis dengan peraturan yang baru, fase ini disebut *Damascus Spring*. Ia membuat banyak kampanye anti korupsi, modernisasi aparatur negara, penggunaan teknologi modern, membangun zona perdagangan bebas, mengizinkan koran-koran swasta, serta kebebasan-kebebasan lain yang mendukung terciptanya demokrasi (Subekti, 2014). Bashar membebaskan rakyat Suriah agar bebas menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah lewat saran kritik langsung melalui media massa atau media cetak. Karena gaya kepemimpinan inilah kemudian Bashar mendapatkan simpati rakyat Suriah.

Selanjutnya dalam hal perekonomian, sistem ekonomi Suriah didominasi oleh tiga golongan yaitu, pemimpin sektor publik, pengusaha dan kalangan elit keamanan dan militer. Untuk golongan-golongan ini diberi hak istimewa khusus yaitu terbebas dari hukum karena berisi orang-orang setia Hafez Al-Assad. Sehingga banyak dari mereka melakukan korupsi dan penyelewengan dana serta penggunaan militer yang menewaskan warga sipil. Pada era Bashar, Ia menentang keras adanya korupsi dan tidak akan memberikan toleransi jika ada petinggi negara yang tersangkut kasus di dalamnya. Bashar menjadi harapan baru bagi rakyat Suriah menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Masyarakat lebih

berani untuk beraspirasi kepada pemerintah. Banyak petisi-petisi dari kelompok masyarakat seperti Ikhwanul Muslimin, *Friends of Civil Society* dan para akademisi Suriah yang dilayangkan kepada pemerintahan Bashar Al-Assad. Diantaranya ialah Petisi Manifesto 1000 yang mewakili suara rakyat untuk lebih bebas berekspresi, adanya kebebasan dalam keberagaman politik, pembebasan tahanan politik dan memulangkan rakyat Suriah yang diasingkan. Bashar Al-Assad mengabdikan petisi-petisi rakyat Suriah dengan membebaskan tahanan politik bahkan membuat kantor surat kabar resmi rakyat Suriah. Kebijakan-kebijakan perubahan Bashar Al-Assad inilah yang disebut sebagai *Damascus Spring*. Namun beberapa bulan setelah menjabat sebagai Presiden Suriah, Bashar Al-Assad mulai berubah sikap. Bashar yang awalnya yang menjunjung demokrasi berubah menjadi sosok ayahnya, Hafez Al-Assad yang otoriter. Bashar mulai membatasi diskusi-diskusi umum dengan membuat peraturan bahwa dalam diskusi tersebut harus diikuti pula petinggi negara. Selain itu, diskusi umum tidak boleh bebas dilakukan jika tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Rakyat yang ingin membuat forum diskusi harus mendaftarkan diri beberapa waktu sebelum diskusi dilaksanakan dengan dilengkapi topik diskusi, siapa pembicaranya, siapa yang hadir dan materi apa yang akan dijelaskan oleh pembicara ke forum tersebut. Jika mendapatkan izin, maka forum tersebut harus mengundang minimal satu petinggi negara untuk mengawasi jalannya forum tersebut. Hal ini dilakukan Bashar karena menilai sudah terlalu banyak kritikan tajam yang didapatkan pemerintah dari rakyat Suriah. Kritikan-kritikan tersebut dianggap sudah melewati batas wajar dan jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan tuntutan-tuntutan lebih besar dari rakyat dan para akademis untuk



reformasi yang lebih besar. Setelah proses pencabutan kebijakan bebas berekspresi dan penolakan petisi-petisi beberapa kelompok masyarakat Suriah oleh Bashar, Suriah kembali pada masa-masa yang sulit. Bashar yang awalnya dianggap sebagai harapan baru rakyat Suriah, ternyata sama seperti Hafez Al-Assad. Rakyat kembali ditekan untuk tunduk terhadap keputusan pemerintah dan dibatasi hak bicarannya. Hal ini yang menimbulkan pertentangan dari masyarakat Suriah sehingga mereka ramai-ramai terbentuk menjadi kelompok-kelompok pemberontakan yang melawan pemerintah.

Selain dari sisi politik, dalam hal ekonomi Bashar mencanangkan revolusi sistem pasar Suriah. Pada awalnya, Suriah yang menganut sistem pasar sentral diubah menjadi pasar ekonomi terbuka. Selain itu, Bashar juga merubah kebijakan dalam bidang keuangan, perbankan, usaha swasta dan investasi. Sejak perubahan kebijakan tersebut, banyak investor datang ke Suriah dan menanamkan modalnya. Presentase jumlah investor asing sebanyak 24% sehingga membantu Suriah membangun ekonomi lebih baik dan tidak lagi tergantung dengan bantuan negara lain.

## **C. Konflik Suriah**

### **1. Faktor-Faktor Pemicu Konflik**

#### **a. Kesenjangan Ekonomi**

Pada masa kepemimpinan Hafez Al-Assad, Suriah berada dalam perekonomian yang sulit. Korupsi terjadi dimana-mana namun pemerintahan Hafez tidak bertindak memberantasnya. Selain itu,

produksi minyak Suriah menurun sedangkan disisi lain jumlah penduduk semakin meningkat. Beban negara semakin diperparah ketika hutang luar negeri kian membengkak. Pasca menjabatnya Bashar Al-Assad, rakyat Suriah mendapatkan harapan baru untuk menjadikan Suriah lebih baik. Bashar memperbaiki berbagai aspek mulai dari politik, konstitusi dan ekonomi. Bashar mengubah sistem pasar Suriah menjadi sistem pasar terbuka serta melakukan pengembangan pada bidang perbankan, keuangan dan investasi. Setelah kebijakan ini diberlakukan, banyak investor datang ke Suriah untuk menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan Suriah. Namun pada tahun 2004, Suriah mendapatkan embargo ekonomi dari Amerika Serikat atas kebijakannya yang melarang perusahaan Amerika Serikat untuk melakukan kegiatan ekonomi di Suriah. Kegiatan ekspor dan import Suriah pun terbatas sehingga perekonomian Suriah runtuh kembali. Produksi minyak yang merupakan seperempat sumber pendapatan utama negara berkurang drastis. Hal ini diperparah dengan ledakan penduduk akibat kebijakan Hafez terdahulu yang melarang adanya program keluarga berencana. Jumlah penduduk yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang setimpal serta bertepatan dengan iklim Suriah yang ekstrim mengakibatkan semakin krisis kondisi Suriah kala itu. Suriah pun tidak bisa memaksimalkan hasil pertanian sehingga Suriah berada pada garis kemiskinan yang parah dan drastisnya kenaikan angka pengangguran. Akibat dari krisis ini, muncul banyak

ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap pemerintah yang dinilai tidak bisa menyejahterakan rakyatnya. Para petinggi negara berada dalam kondisi yang nyaman namun rakyat harus dipaksa hidup dalam kondisi kelaparan dan kemiskinan. Mereka menuntut pemerintah untuk mengembalikan kestabilan ekonomi Suriah dan memberikan hak kesejahteraan bagi rakyat-rakyat kecil.

**b. Kebijakan Politik**

Hafez Al-Assad memimpin dengan otoriter dan tidak memberikan kebebasan rakyatnya untuk beraspirasi. Rakyat Suriah hanya boleh mematuhi kebijakan yang Hafez tentukan, jika ada yang menentang maka Hafez akan mengatasinya melalui jalur militer. Akibat kediktatoran Hafez tersebut, rakyat Suriah harus menerima segala kebijakan yang Hafez buat walaupun dirasa tidak adil. Suriah hanya memiliki satu partai berkuasa yaitu Partai Ba'ath. Partai ini menguasai pemerintahan dan mengontrol ketat sistem pemerintahan, sosial, dan ekonomi di Suriah karena menggunakan militer sebagai ancaman. Walaupun bukan menjadi satu-satunya partai yang ada di pemerintahan, namun setiap pemilu berlangsung Partai Ba'ath akan memenangkan suara dan tetap menjadi pengendali utama pemerintahan. Hal ini dikarenakan di dalam partai ini banyak terdapat orang-orang bawahan Hafez Al-Assad serta sanak saudaranya. Namun, orang-orang terdekat Hafez tersebutlah yang kemudian menimbulkan permasalahan bagi negara karena melakukan kegiatan memperkaya diri dengan memanfaatkan jabatannya. Korupsi merajalela dimana-

mana namun Hafez hanya diam saja seolah tidak mengetahuinya. Dengan sikap Hafez yang seolah tutup mata ini, menimbulkan kecaman di berbagai kalangan rakyat Suriah. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena terbatas oleh kebijakan Hafez yang otoriter.

Setelah Hafez wafat, Bashar Al-Assad menggantikannya sebagai presiden Suriah. Bashar membawa gaya kepemimpinan baru dimana Ia mengganti beberapa kebijakan Ayahnya yang dirasa tidak demokratis. Hal ini disambut gembira oleh rakyat Suriah karena Suriah akan menemukan harapan baru memiliki pemerintahan yang lebih baik. Salah satu kebijakan yang diganti oleh Bashar adalah memperbolehkan rakyat Suriah untuk memberikan aspirasi kepada pemerintah serta bebas membentuk diskusi-diskusi umum demi membangun Suriah lebih demokratis. Namun beberapa bulan kemudian, kebijakan ini dicabut oleh Bashar dengan alasan rakyat Suriah semakin keterlaluhan memberikan kritik kepada pemerintahan. Bashar takut jika kebebasan ini dibiarkan maka akan mengancam kedudukannya sebagai presiden Suriah. Pencabutan kebijakan ini memicu banyak pertentangan dari rakyat Suriah terutama dari para akademisi. Sebagai bentuk kekecewaan tersebut, kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya telah terbentuk mulai melakukan pemberontakan.

**c. Kebijakan Militer**

Disisi lain sikapnya yang otoriter, Hafez Al-Assad dikenal sebagai tokoh yang sangat diperhitungkan di kawasan Timur Tengah. Hafez memperjuangkan hak bangsa Arab untuk bebas dari hegemoni barat khususnya Amerika. Selain itu, Hafez juga berusaha mencegah pengaruh zionis Israel menguasai Tanah Arab. Hubungan tidak baik keduanya terjadi semenjak Israel mengambil dataran Golan milik Suriah dan enggan mengembalikannya. Konflik keduanya terjadi semenjak 1967 dan menimbulkan peperangan antara keduanya selama enam hari. Suriah dibawah kepemimpinan Hafez gencar menekan Israel untuk segera mengembalikan Dataran Golan. Bahkan Hafez berani menunjukkan ketidakramahannya kepada Pemimpin Israel dengan tidak menjabat tangannya ketika bertemu dalam satu forum. Kesepakatan damai hampir didapatkan keduanya dan bersiap melakukan perundingan namun pada masa kepemimpinan Bashar Al-Assad agenda tersebut terus tertunda. Selama berkonflik dengan Israel, Hafez Al-Assad membangun kekuatan militer Suriah demi mengimbangi kekuatan militer Israel. Bahkan Hafez rela mengucurkan dana yang tak sedikit demi memperkuat militer Suriah. Diperkirakan dana sebesar 3,5 milyar dolar AS setara dengan 35% anggaran belanja negara Suriah digunakan untuk memperkuat militer. Suriah juga mendapatkan bantuan dana dan persenjataan dari blok Uni Soviet. Setahun kemudian pada 1986, anggaran untuk militer tersebut dinaikkan hingga 56% dari anggaran belanja negara dan Hafez

membeli peluru kendali jarak menengah dari RRC (Hermawan & M. Nur Rokhman, 2016).

Selain masalah dengan Israel, Suriah berusaha memperbaiki hubungannya dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Suriah kehilangan pengaruh dan kekuasaannya pasca perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet sebagai penyokong utama di Suriah selama ini. Untuk mengembalikan eksistensinya yang mulai redup, Suriah memutuskan untuk ikut bergabung dalam koalisi Amerika Serikat menentang Iraq saat Perang Teluk terjadi. Suriah tidak punya pilihan karena jika Suriah dibiarkan terus melemah, maka Israel akan mudah menguasai daerah Suriah semakin luas. Karena itulah demi memperkuat keamanan negara Suriah, berkoalisi dengan Amerika Serikat walaupun sebenarnya keputusan ini melanggar ideologi Partai Ba'ath yang juga berkuasa di Iraq.

#### **d. Perpecahan Sunni dan Syiah**

Masyarakat Suriah didominasi oleh masyarakat muslim. Masyarakat muslim sebanyak 75%, Kristen 19% dan 6% sisanya adalah sekte-sekte Islam. Populasi umat muslim terbagi menjadi dua, yaitu Sunni dan Syi'ah dimana Muslim Sunni lebih mendominasi dan mempengaruhi nilai-nilai di Suriah. Sunni sendiri merupakan kelompok yang mengakui bahwa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bi Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah para khalifah yang meneruskan kepemimpinan Rasulullah setelah beliau wafat.

Sementara kelompok Muslim Syiah terbentuk ketika Nabi Muhammad SWT wafat dan mereka percaya bahwa Allah telah memilih Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, Umar bin Khattab ataupun Ustman bin Affan. Kepemimpinan ketiganya sebelum Ali bin Abi Thalib dianggap menyalahi aturan dan merampas hak kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. Kaum Syiah juga meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki kemampuan yang seimbang dalam urusan politik dan agama sehingga tidak akan terjadinya ketimpangan pada satu sisi tertentu selama masa pemerintahannya. Sehingga di beberapa negara yang memiliki rakyat Muslim Syiah di dalamnya, mayoritas mereka akan menjadi imam agama sekaligus pemimpin politik. Walaupun mayoritas rakyat Suriah merupakan Muslim Sunni dan nilai-nilai masyarakat dipengaruhi oleh mereka, namun dalam kekuasaan di pemerintahan dikuasai oleh Muslim Alawite Syiah. Mereka menguasai jabatan-jabatan penting dan posisi yang strategis di pemerintahan seperti halnya keluarga Al-Assad. Muslim Syiah menguasai militer Suriah dari tingkatan terbawah hingga tingkatan teratas. Mereka menjadi komandan pasukan-pasukan yang mayoritas merupakan Muslim Sunni.

Kondisi ini dianggap tidak adil oleh Muslim Sunni dikarekan mereka sama sekali tidak mendapatkan bagian kekuasaan dan jabatan di pemerintahan sementara mereka merupakan mayoritas penduduk di Suriah. Kesenjangan yang terjadi ini menimbulkan konflik di Suriah

ketika Muslim Sunni mulai meminta agar mereka mendapatkan bagian yang sama seperti halnya Muslim Syiah di bagian pemerintahan. Karena hal inilah, Muslim Sunni lebih banyak mendukung pihak oposisi penentang Bashar Al-Assad ketimbang pemerintahannya. Mereka sebenarnya merasa tidak adil ketika Bashar seolah-olah dijadikan kandidat tunggal sdengan pemilihan umum yang diatur dan dipaksakan agar Bashar menang menjadi presiden. Walaupun memang Hafez Al-Assad memang sengaja menyiapkan rencana ini semasa hidupnya. Keluarga Al-Assad yang merupakan Muslim Syiah ini berusaha menjaga agar kekuasaannya tidak jatuh kepada orang lain selain keluarganya. Sehingga mereka akan menggunakan wewenang mereka untuk menyingkirkan orang-orang yang berusaha merebut kekuasaannya. Hal ini tentu saja melanggar konstitusi yang berlaku di Suriah yang menjunjung kesetaraan dan persamaan bagi semua warga negaranya mengatur pemerintahan secara bebas dan non diskriminasi. Namun konstitusi ini seakan dilupakan oleh pejabat-pejabat tertinggi demi mempertahankan kekuasaan mereka. Rakyat Suriah tidak dapat berbuat banyak karena mereka akan berhadapan dengan militer Suriah jika berusaha menentang keputusan pemerintah ini.

Pada awalnya, Muslim Sunni dan Muslim Syiah memiliki hubungan yang baik dan saling bekerjasama. Bahkan mayoritas Rakyat Suriah sangat antusias atas adanya sosok seperti Hafez Al-Assad. Bahkan saat pemilihan umum presiden, Hafez mendapatkan dukungan suara hampir 99% termasuk Muslim Sunni yang mayoritas



memberikan suara kepada Hafez walaupun ia berasal dari Muslim Syiah. Hal ini membuktikan bahwa Muslim Sunni dan Muslim Syiah tidak bermasalah satu sama lain, mereka hidup berdampingan dan saling toleransi dengan baik. Bahkan orang-orang kepercayaan Hafez di pemerintahan berasal dari Muslim Sunni. Namun, sayangnya ketika Hafez memutuskan untuk mempersiapkan penerusnya berasal dari keluarganya sendiri, Hafez mulai menyingkirkan pihak-pihak yang tidak mendukung keputusannya ini. Tentu saja mayoritas yang menentang keputusan ini adalah mereka yang berasal dari Muslim Sunni. Mereka merasa keputusan Hafez tidak adil bagi rakyat Suriah dan melanggar konstitusi. Akhirnya Hafez memecat Muslim Sunni yang menentang kebijakannya termasuk orang-orang kepercayaan Hafez pada awal pemerintahannya yang berasal dari Muslim Sunni. Mereka dipecat dengan tuduhan telah melakukan korupsi pada uang negara. Semenjak pemecatan yang dilakukan Hafez ini, gejolak konflik antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah semakin besar dan hubungan keduanya sebagai sesama Muslim tidak lagi baik.

**e. Arab Spring**

Konflik-konflik di Suriah kian memanas dan menyebabkan gelombang demonstrasi dengan skala besar di beberapa kota di Suriah. Ternyata hal ini bertepatan juga dengan efek *Arab Spring* yang tengah melanda beberapa negara di Arab. *Arab Spring* merupakan sebuah bentuk proses perubahan politik di Arab yang terjadi sejak tahun 2011 yang ditandai dengan demonstrasi besar-besaran menuntut rezim

puluhan tahun agar berakhir (Indonesia, 2015). Suriah menjadi salah satu negara yang stabil disaat negara-negara Arab lain tengah mengalami gejolak pemberontakan dengan melakukan demo-demo memaksa mundur rezim yang tengah berkuasa di negara tersebut. Banyak yang menilai rezim Assad sangat baik mempertahankan kekuasaannya terlebih lagi militer Suriah yang semakin kuat. Militer digunakan untuk menjaga kestabilan politik negara dan menjadi alat untuk menekan masyarakat yang menentang rezim. Selain itu, rezim Al-Assad menentang pengaruh barat, sehingga berhasil membentuk kepercayaan rakyat atas pemerintahannya. Keberadaan Muslim Alawite Syiah yang menguasai mayoritas posisi-posisi penting di pemerintahan dan militer juga menjadi salah satu kekuatan Suriah agar tidak ikut dalam arus *Arab Spring*. Penempatan orang-orang kepercayaan Al-Assad di sektor-sektor penting memperkecil kemungkinan adanya pemberontakan dan menjaga kestabilan politik negara.

Namun pengaruh *Arab Spring* yang semakin gencar terjadi seperti di Tunisia, Mesir dan Libya sedikit demi sedikit meruntuhkan pertahanan Suriah. Gencarnya publikasi demonstrasi negara-negara Arab untuk menggulingkan rezim abadi di negaranya memicu rakyat Suriah untuk melakukan hal yang sama. Namun rakyat Suriah belum berani muncul dalam demo besar-besaran secara fisik dikarenakan jumlah mereka yang tak memungkinkan. Seruan demo dimulai lewat media sosial oleh para aktivis namun berhasil diredam oleh militer

Suriah dengan memberikan ancaman. Upaya pemberontakan di Suriah pun sempat surut, namun kemudian gerakan pemberontakan *Arab Spring* Suriah dimulai ketika terjadi penculikan penyiksaan kepada anak-anak di Kota Deraa setelah membuat sebuah graffiti di dinding sekolah yang berisi bahwa rakyat ingin menumbangkan rezim. Sebanyak 15 orang anak ditahan oleh polisi dan para orang tua yang tidak terima anak-anaknya ditahan dan disiksa mulai melakukan protes kepada pemerintah. Pihak keamanan Suriah melakukan pembubaran paksa demonstran tersebut dengan menggunakan senjata sehingga menimbulkan korban jiwa. Sikap pihak keamanan ini semakin memicu rakyat Suriah untuk terus berdemonstrasi, bahkan di beberapa negara terjadi demonstrasi dengan kasus yang berbeda. Rakyat Suriah perlahan-lahan mulai berani untuk bersuara dan konflik di Suriah pun dimulai.

## **2. Aktor-Aktor yang Terlibat Konflik**

Dalam konflik yang terjadi di Suriah, terdapat beberapa pihak yang ikut terlibat. Pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan masing-masing sehingga turut ikut andil dalam konflik. Bahkan banyak diantara mereka yang menjadikan konflik semakin rumit dan tidak kunjung usai.

### **a. Bashar Al-Assad dan Pendukung**

Bashar Al-Assad adalah pengganti presiden Suriah setelah presiden sebelumnya yaitu Hafez Al-Assad wafat. Bashar Al-Assad adalah putra kedua dari Hafez Al-Assad yang pernah menuntut

pendidikan di Eropa. Keputusan bahwa Bashar yang akan menduduki kursi presiden terbilang mendadak dikarenakan sebelum ini Hafez menunjuk putra tertuanya bernama Basil Al-Assad sebagai penggantinya. Namun tak disangka Basil mengalami kecelakaan mobil dan tewas. Hafez pun tak punya pilihan lain selain segera memanggil pulang Bashar Al-Assad dan menyiapkan Bashar menjadi pemimpin Suriah. Demi keberhasilan naiknya Bashar menjadi presiden Suriah, Hafez menyingkirkan pihak-pihak yang menghambat rencana tersebut. Banyak diantaranya adalah orang-orang kepercayaan Hafez terdahulu. Mereka dipecat paksa dari jabatannya dengan tuduhan melakukan korupsi. Akhirnya Bashar Al-Assad berhasil memenangkan suara pada pemilihan umum dan dilantik menjadi presiden. Karena tinggal cukup lama di Eropa, sifat Bashar lebih bebas daripada Ayahnya. Bashar banyak merubah kebijakan khususnya kepada kebebasan rakyat untuk beraspirasi. Namun sayangnya, sikap Bashar berubah drastis setelah beberapa bulan menjabat. Ia bersikap seperti halnya Ayahnya yaitu melarang adanya kebebasan kelompok berkumpul, diskusi dan berbicara bebas pada pemerintahan. Bashar seolah meneruskan 4 pilar penting yang ayahnya bangun sebelum ini, yaitu pertama, kekuasaan Suriah berada ditangan keluarga Al-Assad. Kedua, berusaha mempersatukan Muslim Alawite Syiah. Ketiga, mengontrol aparaturnya militer dan keamanan. Keempat, keberadaan monopoli partai Ba'ath dalam sistem politik. Karena hal ini, munculah rasa ketidakpuasan rakyat Suriah dengan pemimpin yang awalnya mereka percaya akan

membawa perubahan besar pada Suriah. Rakyat Suriah mulai melakukan pemberontakan.

Dibalik kekuasaannya, Bashar dibantu oleh negara-negara yang mendukungnya seperti Rusia dan Iran. Kerjasama Suriah dan Rusia terjadi sejak masa pemerintahan Hafez Al-Assad dan keduanya semakin dekat setelah melakukan penandatanganan perjanjian pakta pertahanan. Setelah perjanjian itu, Rusia mengirimkan senjata senilai 135 juta dolar AS ke Suriah dan pada tahun 1980 pakta tersebut diperpanjang hingga 20 tahun selanjutnya (Putri & Olivia). Dalam hal ekonomi, Suriah dan Rusia memiliki kerjasama yang baik khususnya dalam kerjasama perdagangan senjata, infrastuktur, industri serta sepertiga pemrosesan minyak merupakan bantuan dari Rusia juga. Dalam hal industry, Suriah dan Rusia bekerjasama dalam proyek pengembangan minyak bumi dan gas alam, konstruksi pembangkit listrik, pangkalan militer dan perbaikan beberapa infrastruktur industri (Hermawan & M. Nur Rokhman, 2016). Dalam sudut pandang politis, kehadiran Rusia di Suriah merupakan suatu bentuk pertahanan kekuasaan khususnya di Timur Tengah. Rusia membantu mempertahankan jabatan presiden Bashar Al-Assad sebagai bentuk kekhawatiran jika Bashar lengser maka pengaruh Rusia di Timur Tengah juga turut menghilang. Apalagi posisi Suriah dinilai sangat strategis karena berada di tengah negara-negara yang dikuasai Amerika Serikat. Sehingga dengan menguasai Suriah, maka Rusia akan mudah untuk mengawasi pergerakan Amerika Serikat dari dekat. Selain Rusia,

ada Negara Iran yang turut ikut mempertahankan Bashar Al-Assad berada di kursi kepresidenannya. Namun, tujuan dukungan Iran ini semata-mata karena ingin melawan pengaruh negara-negara barat di Timur Tengah khususnya Amerika Serikat. Pemerintah Iran fokus membantu dalam hal militer dan mengisi kekosongan jabatan militer yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengkhianati Bashar Al-Assad dan ikut menjadi demonstran pihak oposisi. Selain negara-negara, pendukung rezim Bashar muncul dari kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok Shabbiha dan Kelompok Hizbullah diantaranya. Kelompok-kelompok ini ikut membantu memerangi para oposisi dan menjadi bagian resmi dari militer Suriah. Kelompok Shabbiha merupakan kelompok kriminal yang sudah lama berada di Suriah dan mereka mengedepankan kekerasan sebagai kegiatannya. Sementara Hizbullah merupakan kelompok Muslim Syiah yang datang dari Lebanon untuk membantu Suriah memerangi oposisi. Hubungan antara Bashar dan Hizbullah terjalin karena Suriah pernah membantu Lebanon untuk melawan Israel. Hafez Al-Assad terdahulu bahkan mengerahkan angkatan militer Suriah demi membantu mencegah Israel masuk ke Lebanon. Selain itu, Hizbullah mendapatkan bantuan militer Iran melewati Suriah, sehingga jika Bashar Al-Assad berhasil lengser maka keberadaan Hizbullah akan terancam pula karena kehilangan bantuan militer utamanya.

## **b. Pihak-pihak Oposisi**

Selain pihak pendukung Bashar Al-Assad sebagai presiden, ada banyak pihak yang berperan sebagai pihak oposisi. Diantaranya adalah keberadaan Amerika Serikat. Amerika Serikat banyak ikut andil dalam permasalahan negara Timur Tengah, hal ini dilakukannya demi mendapatkan sumber energi untuk kebutuhan dalam negerinya khususnya minyak. Tidak memiliki cadangan minyak dan gas akan menghancurkan perekonomian Amerika Serikat karena akan menghancurkan pula usaha industri-industri di dalamnya (Bahar, 2014). Amerika Serikat berusaha menggulingkan kekuasaan Bashar Al-Assad demi menguasai Suriah dan memperluas pengaruh politiknya. Selain Amerika Serikat, Arab Saudi juga turut andil memberikan tekanan agar Bashar Al-Assad lengser dari jabatannya. Bahkan berkat Arab Saudi, isu kekerasan di Suriah ini mencuat sebagai isu internasional. Arab Saudi melaporkan kekerasan Suriah kepada PBB namun sayangnya usaha ini gagal karena beberapa negara seperti yang tergabung dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan) tidak menyetujui resolusi tersebut. Bahkan Rusia dan Cina memberikan hak vetonya sehingga menggagalkan rencana Arab Saudi untuk menguasai politik Suriah. Karena kegagalannya usahanya membawa kasus Suriah ke ranah internasional, maka Arab Saudi mencari cara lain dengan menggalang dana kepada aktivis dan masyarakat Arab Saudi yang kemudian dana itu akan diberikan kepada

pihak oposisi untuk kebutuhan senjata senilai 100 juta dolar Amerika Serikat.

Selain negara-negara pendukung, ada beberapa kelompok masyarakat yang bersatu membentuk gerakan oposisi penentang Bashar Al-Assad yaitu Dewan Keamanan Suriah. Mereka terbentuk beberapa bulan setelah pecahnya revolusi yaitu pada Bulan Oktober. Kelompok ini berisi para pemuda revolusi dan tokoh-tokoh nasional penentang rezim Bashar Al-Assad. Mereka membantuk satu kesatuan agar gerakan pemberontakan mereka lebih terorganisir dan meminimalisir Bashar Al-Assad untuk menangkap satu persatu dari mereka. Walaupun kelompok ini menentang rezim Bashar, namun kelompok ini mengedepankan karakter revolusi Suriah yang anti kekerasan, independen dan non intervensi asing. Bentuk perlawanan mereka tak lepas dari militer namun mereka mengantisipasi dan melarang anggotanya untuk menyakiti warga sipil. Mereka fokus melawan para pendukung Bashar Al-Assad yang mayoritas berasal dari golongan militer. Bantuk keanggotaan mereka terbuka bagi kelompok atau tokoh perjuangan apapun. Seperti halnya Tentara Pembebasan Suriah atau *free Syrian Army* yang tergabung dalam Dewan Keamanan Suriah telah melakukan perlawanan kepada kelompok kriminal Shabbiha. Karena merupakan kelompok kriminal yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, Tentara Pembebasan Suriah turut mengangkat senjata sebagai bentuk perlawanan dan perlindungan. Dewan Keamanan Nasional Suriah ini mendapatkan



dukungan penuh dari Liga Arab. Sebelumnya Liga Arab pernah memerintahkan Suriah untuk menghentikan aksi kekerasan kemanusiaan. Namun Pemerintah Suriah menolak usulan Liga Arab tersebut dan mengakibatkan ditanggukannya posisi Suriah di forum Liga Arab pada Nopember 2011. Liga Arab mengakui eksistensi dari Dewan Keamanan Nasional Suriah dan memberikan kursi Suriah yang kosong kepada mereka. Tindakan Liga Arab ini tentu saja mendapat kecaman keras dari Rusia dan Iran sebagai pendukung rezim Bashar Al-Assad.

### **3. Awal Mula Terjadinya Konflik**

Setelah Bashar naik dan menjabat menjadi presiden Suriah menggantikan Hafez Al-Assad, kondisi Suriah semakin berkembang. Gaya pemerintahan Bashar sangat berbeda dari ayahnya yang otoriter. Bashar ingin menjadikan Suriah lebih demokratis dengan membebaskan rakyat yang dulunya hanya boleh diam dan menuruti keputusan pemerintah, kini mereka bebas untuk berpendapat. Rakyat Suriah menyambut baik kebijakan Bashar tersebut dan memanfaatkan baik peluang yang diberikan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat. Namun, sayangnya beberapa bulan setelah menjabat menjadi Presiden Suriah, Bashar merubah sikap dan kebijakannya. Ia membatasi forum-forum diskusi bahkan membatasi aspirasi rakyat kepada pemerintah. Gaya kepemimpinan Bashar sama halnya saat kepemimpinan Hafez Al-Assad, sehingga Suriah kembali dipimpin oleh presiden yang diktator.

Namun sayangnya pada tahun 2004, Suriah mendapatkan sanksi embargo ekonomi dari Amerika Serikat yang menyebabkan kegiatan eskport-import Suriah terbatas. Hal ini menyebabkan gejolak ekonomi dalam negeri serta protes besar-besaran dari rakyat Suriah. Sanksi ini diberikan karena kebijakan Suriah yang melarang perusahaan milik Amerika Serikat melakukan kegiatan perekonomian di Suriah. Keadaan ekonomi Suriah memburuk setelah munculnya banyak pengangguran akibat bongkar tenaga kerja. Bashar menempatkan orang-orangnya di berbagai sektor dan memecat tenaga kerja sebelumnya. Mayoritas yang dipecat adalah para pemuda sehingga sulit untuk mereka mendapatkan pekerjaan pengganti dengan cepat. Tahun 2008 dan 2010 ekonomi Suriah semakin terpuruk karena pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Banyak pengangguran yang menjadi beban negara. Hal ini diperparah lagi dengan menurunnya produksi minyak dan hasil pertanian Suriah akibat iklim ekstrim yang tengah melanda Suriah. Dengan situasi Suriah yang buruk ini, masyarakat mulai mengajukan protes serta menginginkan reformasi terhadap rezim yang berkuasa karena dinilai gagal menyejahterakan rakyat Suriah.

Pemberontakan oleh rakyat Suriah juga dipelopori oleh adanya pengaruh *Arab Spring* yang sebelumnya terjadi di negara-negara tetangga. Seperti di Tunisia, rakyat Tunisia berhasil menggulingkan rezim Presiden Zine Abidin Bin Ali pada Januari 2011. Disusul oleh Mesir yang berhasil menggulingkan rezim Presiden Husni Mubarak

serta di Libya berhasil menggulingkan Presiden Mohammad Khadafi yang memerintah selama 40 tahun. Digulingkannya para presiden di beberapa negara tersebut merupakan sebuah bentuk kebebasan dari rakyatnya atas belenggu pemerintahan yang cenderung otoriter dan menggunakan militer sebagai penyelesaian masalah. Awalnya Suriah dianggap menjadi negara yang tahan terhadap pengaruh *Arab Spring* karena pertahanan rezim Al-Assad yang kuat. Namun, ternyata hal ini terbantahkan seiring semakin banyaknya kasus rakyat Suriah yang tertindas oleh sikap pemerintah. Masalah ekonomi Suriah yang kian memburuk dan perlakuan diskriminasi kepada masyarakat pinggiran yang menyebabkan mereka jatuh pada garis kemiskinan menjadi faktor penunjang semakin besarnya pendukung oposisi rezim Bashar Al-Assad.

Rakyat Suriah mulai gencar menyerukan demonstrasi besar-besaran melalui sosial media pada Februari 2011. Para demonstran yang terdiri dari para aktivis kemanusiaan tersebut menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi. Namun, upaya ini mampu digagalkan oleh badan keamanan Suriah dengan pemberian terror dan ancaman kepada para aktivis yang bersangkutan. Namun pada Maret 2011, demonstrasi besar-besaran terjadi di Kota Deraa, sebuah kota kecil di Suriah bagian Selatan dimana sebelumnya terjadi penangkapan 15 anak sekolah. Anak-anak ini ditangkap setelah menulis sebuah graffiti di dinding sekolah mereka yang berisikan sebuah pernyataan bahwa rakyat ingin menumbangkan rezim Bashar Al-Assad. Kelima

belas anak tersebut ditangkap dan dianiaya oleh badan keamanan Suriah. Merasa tidak terima karena anak-anak mereka disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi, para orang tua anak-anak tersebut datang ke Gedung Gubernur Deraa untuk melakukan demonstrasi meminta pembebasan kelima belas anak tersebut. Namun aksi tersebut dibubarkan paksa oleh Badan Keamanan Suriah dengan menembaki beberapa demonstran sehingga jatuh korban jiwa akibat demonstrasi tersebut. Semenjak demonstrasi tersebut, munculah bentuk demonstrasi yang lain diantaranya menuntut pemerintah Suriah untuk melakukan reformasi. Menanggapi insiden tersebut, Bashar Al-Assad mengumumkan akan membebaskan anak-anak yang ditangkap tersebut dan akan melakukan reformasi politik dengan menghapuskan pembatasan partai politik dan undang-undang darurat Suriah. Namun hal ini diabaikan oleh pihak oposisi dan mereka tetap melakukan demonstrasi setelah melaksanakan Shalat Jumat. Demonstrasi kian intens dan mendapat perlawanan dari pendukung Bashar Al-Assad dimana mereka melakukan demonstrasi pula di Damaskus. Pada April 2011, kembali terjadi kasus penembakan oleh pasukan keamanan kepada demonstran. Dengan semakin berlarutnya kasus penembakan warga sipil ini, sehingga menimbulkan kecaman dari internasional. Mayoritas kepala negara menyerukan agar Suriah menghentikan perilaku kekerasan kepada rakyatnya tersebut. Bashar kemudian membentuk kabinet baru setelah membubarkan kabinet yang lama demi memenuhi tuntutan para demonstran. Kabinet baru tersebut juga menghapuskan

undang-undang darurat. Namun, pemerintah Suriah membuat kebijakan baru dimana rakyat tidak diperkenankan bebas melakukan demonstrasi. Untuk melakukan demonstrasi, mereka harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Pemerintah meningkatkan bentuk keamanan pada para demonstran seperti halnya terjadi penembakan terhadap rakyat Suriah yang tengah berkumpul setelah Shalat Jumat. Tindakan ini dilakukan pemerintah Suriah untuk membungkam masyarakat. Bahkan pemerintah melakukan pemadaman listrik, alat komunikasi, telepon dan internet agar masyarakat tidak memiliki akses untuk merencanakan pemberontakan selanjutnya.

Tindakan pemerintah Suriah membungkam rakyat tersebut tersebut tak menyurutkan semangat rakyat Suriah untuk terus melakukan demonstrasi menginginkan reformasi. Pada Mei 2011, protes-protes rakyat Suriah terhadap rezim Bashar Al-Assad sudah mencapai Damaskus. Aksi demonstrasi ini ditangani dengan serius oleh pihak keamanan pemerintah Suriah karena berada di pusat kota. Mereka mengepung para demonstran agar tidak menyebar terlalu luas di Damaskus. Pada Juni 2011, ada berita yang tersiar bahwa tentara Suriah yang menolak menembaki demonstran telah ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga sebagai tentara Suriah yang ditugaskan khusus. Bashar Al-Assad menanggapi kabar itu dengan mengirimkan serangan ke wilayah tersebut dan ribuan rakyat Suriah melarikan diri ke Turki. Penggunaan kekerasan oleh rezim Al-Assad kian memburuk pada Bulan Juni dan Agustus dan Bashar melakukan

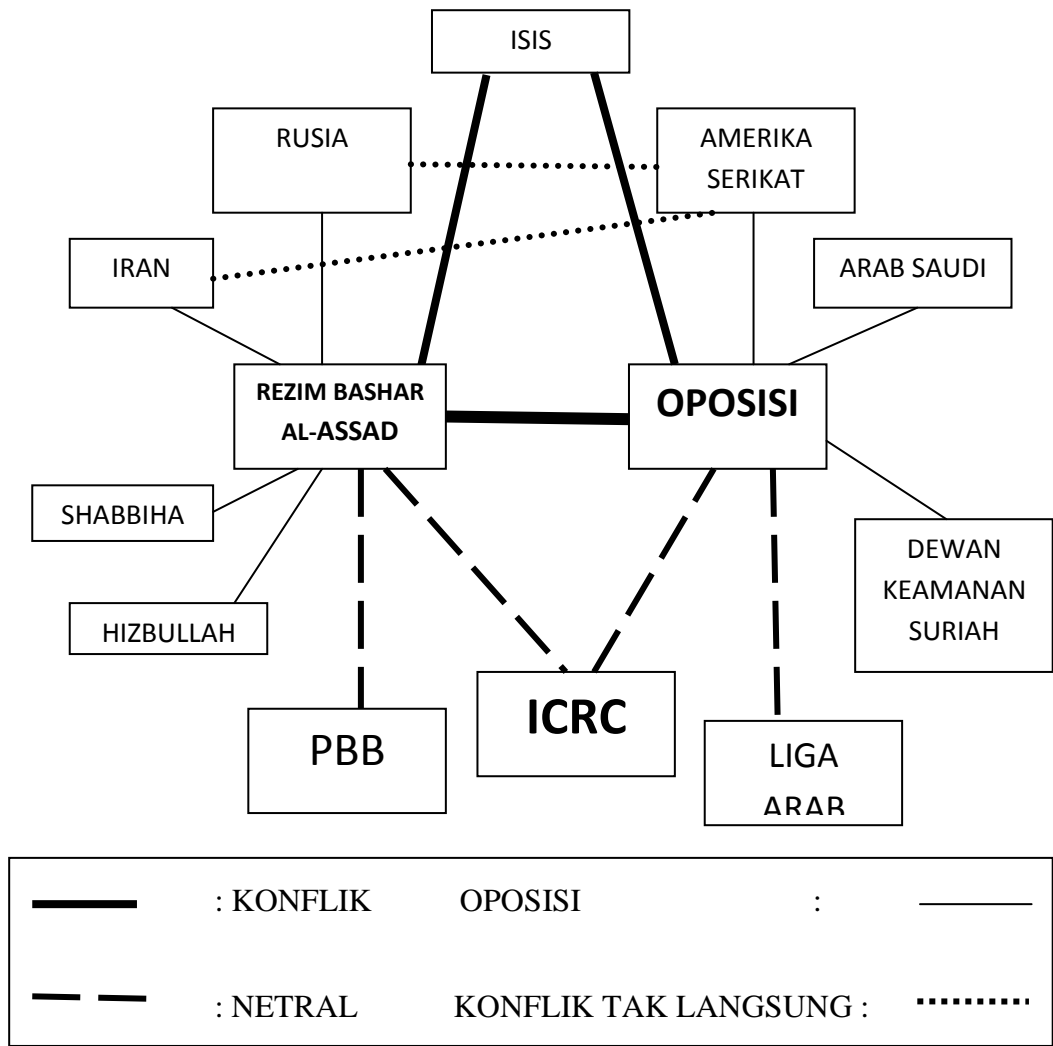
serangan militer ke beberapa kota di Suriah yang masih aktif melakukan demonstrasi. Atas tindakannya ini, Bashar Al-Assad kian mendapatkan kecaman internasional dan dipaksa untuk lengser. Bashar Al-Assad dianggap tidak layak mendapatkan kedudukan sebagai presiden di Suriah. Suriah dinilai telah hilang kedaulatannya karena sikap pemerintahannya yang tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pada tahun 2011 juga, konflik Suriah akhirnya dibawa ke ranah internasional dan dibahas dalam forum PBB. Uni Eropa turut menjatuhkan sanksi kepada pemerintah Suriah yaitu melarang perjalanan pejabat Suriah yang bertanggungjawab atas konflik serta membekukan aset mereka di Uni Eropa. Uni Eropa juga melakukan embargo senjata ke Suriah. Namun sanksi tersebut tak membuat Suriah menghentikan serangannya kepada para pihak oposisi. Pada pertengahan tahun 2011, Rezim Al-Assad kembali melancarkan serangan militernya ke kota Hama dan Lattakia. Di penghujung tahun 2011, Suriah semakin mendapat banyak kecaman sehingga posisinya menjadi terpojokkan. Akhirnya Suriah menyetujui inisiatif Liga Arab mengunjungi Suriah untuk memantau langsung bagaimana situasi konflik terjadi. Tim Pemantau dikirimkan masuk ke Suriah untuk melakukan penilaian pada awal tahun 2012 dan tim pemantau melaporkan konflik yang terjadi di Suriah hasilnya positif atau baik-baik saja. Tentu saja hal ini memicu kritik keras dari masyarakat internasional khususnya para pejuang HAM. Dan setelah ditelusuri ternyata laporan tersebut merupakan laporan palsu yang sengaja

disabotase oleh Suriah. Bahkan tim menilai ternyata mendapatkan ancaman kekerasan selama bertugas di Suriah. Melihat tindakan Suriah tersebut, Liga Arab segera memberikan penangguhan kepada keberlanjutan proses pemantauan.

Aksi tembak menembak yang mengakibatkan semakin tingginya korban jiwa antara pasukan Bashar Al-Assad dengan pihak oposisi masih terus berlangsung. Sese kali aksi mereka terhenti oleh kehadiran pihak internasional seperti Liga Arab maupun PBB. Namun aksi damai ini hanya berlangsung beberapa hari, selanjutnya konflik kembali terjadi. Pada akhir tahun 2012, pihak oposisi telah menguasai wilayah utara Suriah namun mereka terkendala dengan kebutuhan senjata. Sementara pasukan Bashar mengalami kemunduran akibat banyak kehilangan tentaranya karena banyak yang berpihak kepada para oposisi. Momen ini yang kemudian digunakan oleh pendukung keduabelah pihak untuk mencari penyokong pendanaan khususnya dalam hal pasokan senjata dan tentara. Ada Turki, Arab Saudi dan Qatar sebagai negara penyokong dana senjata bagi pihak oposisi pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013. Sementara itu, ada Iran kelompok militan Lebanon bernama Hizbullah yang membantu pasukan Bashar Al-Assad. Dengan keikutsertaan pihak-pihak yang tidak ikut berkonflik namun turut membantu memberi pasokan dana, senjata dan militer, maka babak baru konflik pun dimulai. Bahkan dalam babak baru peperangan ini diduga terdapat penggunaan bahan kimia sebagai senjata oleh pasukan Al-Assad. Akibat hal ini, Amerika

Serikat, Inggris dan Perancis mengecam keras pemerintah Suriah dan berencana akan ikut andil dalam serangan militer konflik Suriah. Pihak Al-Assad menyambut dengan berani kecaman itu bahkan menyebutnya sebagai agresi militer barat. Namun, ternyata aksi militer ini tidak terealisasi. Jalur diplomasi dicoba untuk diterapkan demi menarik penggunaan senjata militer di Suriah pada akhir tahun 2013 (Fahham & Kartaatmaja, 2014). Keterlibatan pihak-pihak asing semakin intens terjadi pada tahun 2014 dan 2015, bahkan tindakan militer Bashar Al-Assad semakin membabi buta karena tidak memperkirakan lagi keselamatan warga sipil. Munculnya kelompok militan yang menamakan diri mereka Negara Islam atau disebut dengan ISIS (*Islamic State of Iraq dan Syria*) semakin memperkeruh keadaan. Pada Pertengahan 2014, ISIS telah melakukan pembantaian penduduk di Homs guna merebut ladang minyak. Dalam kurun waktu yang singkat, ISIS telah menguasai hampir 35% wilayah Suriah. Karena keberadaan ISIS ini, kemudian Amerika Serikat ikut turun tangan dalam melawan pergerakan ISIS. Dan tahun 2014 menjadi tahun terburuk sepanjang konflik Suriah berlangsung. Semenjak kemunculan ISIS ini, kota-kota di Suriah semakin banyak dikuasai dan banyak korban berjatuhan termasuk para tentara Suriah dan warga sipil. Hingga pada tahun 2015, konflik Suriah sudah melibatkan banyak pihak dan menjadi konflik skala internasional.





#### 4. Dampak Konflik

Konflik Suriah yang terjadi bertahun-tahun menyebabkan kota-kota besar di Suriah dan bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi daya tarik pariwisata turis menjadi hancur. Kota Aleppo misalnya, sebagai kota terbesar dan bersejarah di Suriah yang memiliki tempat-tempat terkenal seperti Kompleks Masjid Umayyah pun ikut hancur. Begitupun dengan Warisan Dunia di Suriah yang berada dibawah tanggungjawab UNESCO termasuk Kota Bosra Selatan yang terkenal dengan julukan kota kuno karena memiliki bangunan jaman abad pertengahan. Beberapa diantaranya hancur karena disengaja untuk

dicuri situs-situs arkelolognya dan sisa lainnya hancur karena serangan militer. Aktor utama atas kerusakan di Kota Bosra ini adalah para militan ISIS karena penjualan situs-situs arkeolog tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan senjata. Selanjutnya, Kota Homs sebagai kota terbesar ketiga di Suriah kini berubah menjadi blok puing-puing reruntuhan. Akibat kerusakan ini, Bank Dunia memperkirakan jumlah kerugian Suriah dari awal konflik sampai akhir tahun 2014 atas enam kota besar yang hancur yaitu Aleppo, Daraa, Homs, Hama, Latakia dan Idlib sebesar 4,5 miliar dollar Amerika Serikat (Firmansyah, 2016). Karena konflik terus berlanjut, Suriah berada dalam kondisi perekonomian yang buruk. Pendapatan negara terhenti dan infrastruktur pendukung hancur. Rakyat Suriah bangkrut akibat kehancuran usaha mereka serta tindakan pencurian oleh pihak-pihak tertentu, sementara keamanan Suriah tidak lagi mampu menjamin keamanan rakyatnya. Pihak keamanan Suriah terfokus mengatasi para pemberontak bahkan sampai membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Ekspor minyak Suriah yang sebelumnya buruk kian anjlok dan ditambah pula Suriah mendapatkan sanksi internasional di berbagai sektor.

Akibat konflik saudara ini, jumlah korban yang jatuh mencapai 470 ribu jiwa. Angka ini meningkat dua kali lipat dari yang diperkirakan (Syalaby, 2016). Sekitar 11,5% warga Suriah telah tewas dan terluka dan banyak diantaranya kehilangan mata pencaharian. 45% penduduk terpaksa berpindah ke kota yang aman untuk

menyelamatkan diri termasuk melarikan diri menjadi migran. Menurut *Syrian Center of Policy Research* banyak penduduk sekarat karena minimnya, makanan obat-obatan dan perawatan. Penduduk menderita penyebaran penyakit yang akut karena kondisi yang tidak layak dan keterbatasan makanan serta air bersih. Bahkan demi bertahan hidup mereka terpaksa memakan makanan hewan dan dedaunan. Bantuan-bantuan internasional dilaporkan sulit untuk masuk ke beberapa kota di Suriah seperti di Damaskus, Aleppo dan Homs dikarenakan ditutup aksesnya oleh Pemerintah Suriah. Ketiga kota tersebut dikepung dan dijaga oleh tentara-tentara Bashar Al-Assad untuk memperkecil kemungkinan adanya bantuan senjata atau bantuan tentara dari pihak oposisi. Karena ditutupnya akses-akses keluar masuk kota, maka para relawan juga tidak dapat menjangkau para korban yang tengah terjebak konflik tersebut. Banyak diantara mereka tewas karena tak mendapat perawatan yang layak serta kelaparan selama sehari-hari. Karena penderitaan dalam negeri yang sedemikian rupa, ketika penduduk berkesempatan melarikan diri, mereka akan memilih untuk mengungsi ke negara lain disekitar Suriah. Menurut PBB, ada sekitar 6,5 juta pengungsi di dalam negeri dan 4,8 juta pengungsi di luar Suriah. Pengungsi yang keluar Suriah rata-rata berada di Yordania, Turki, Lebanon dan Irak. Beberapa diantaranya melakukan perjalanan ekstrim ke Eropa (Firmansyah, 2016). Turki menjadi negara paling banyak yang menampung pengungsi yaitu sebesar 2,7 juta jiwa dan kemudian Lebanon sebanyak 1 juta jiwa. Di Yordania jumlah pengungsi sekitar

630.000 jiwa, di Irak 200.000 jiwa dan Mesir sebanyak 130.000 jiwa. (Yusmadi, 2016).

Atas kerusakan dan tingginya jumlah penduduk Suriah yang tewas, Pemerintah dan Pasukan Suriah bertanggungjawab besar dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia Rakyat Suriah berdasarkan bukti-bukti nyata adanya penyiksaan, penganiayaan dan pembunuhan yang tak beralasan. Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa konflik di Suriah bukan lagi konflik perang militer dengan skala besar. Berdasarkan laporan-laporan yang sudah masuk ke PBB, Suriah jelas telah melakukan pelanggaran serius terhadap rakyatnya sendiri khususnya kepada perempuan dan anak-anak. Tentara Suriah tak segan menjadikan perempuan dan anak-anak tersebut menjadi sandera bahkan mereka mendapatkan kekerasan yang tidak seharusnya. Melihat kondisi ini, Dewan PBB membentuk suatu komisi penyelidikan khusus untuk Suriah. Komisi Independen ini bertugas mencari data dan bukti atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah. Karena tindakan inilah kemudian dunia internasional menilai Suriah gagal mempertahankan kedaulatan negaranya dan apa yang sudah dilakukan pemerintah Suriah kepada rakyatnya menyalahi aturan kemanusiaan. Banyak aktor-aktor internasional yang berusaha masuk ke Suriah untuk membantu penyelesaian konflik dan memberikan bantuan.